



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

LAPORAN KINERJA 2024

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INFRASTRUKTUR DASAR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Sehubungan dengan baru terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian/Lembaga, dimana Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi salah satu Kementerian Koordinator pada Kabinet Merah Putih, maka Laporan Kinerja ini hanya memuat kinerja Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selama periode Oktober s.d. Desember 2024.

Laporan kinerja ini memuat capaian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan *quick wins* Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Dengan tersusunnya laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan kinerja organisasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya.

Plt. Deputy Bidang Koordinasi
Infrastruktur Dasar,

M Rachmat Kaimuddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2024 Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar (Deputi Infra Dasar) berhasil disusun atas kontribusi semua pihak. Penyusunan Laporan ini untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistematika penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian pada Kabinet Merah Putih, maka laporan yang disampaikan merupakan capaian atas *quick wins* dari unit kerja Deputy Infra Dasar periode Oktober sd. Desember 2024. Selain belum ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Infra periode 2024-2029, juga belum adanya dokumen Perjanjian Kinerja seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infra.

Hingga Desember 2024, *quick wins* yang dilaksanakan oleh Deputy Infra Dasar yakni:

1. Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Sidan yang berlokasi di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku, pengendalian banjir, serta mendukung ketahanan energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM).
2. Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Karian yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 315 juta meter kubik dengan luas genangan 1.773 hektare. Tujuan pembangunan bendungan ini adalah untuk mendukung penyediaan air baku, irigasi pertanian, pengendalian banjir, serta potensi energi listrik.

Anggaran yang digunakan oleh Kemenko Infra selama kinerja periode Oktober s.d Desember 2024 yakni sisa anggaran yang dimiliki Kemenko Marves, sehingga nomenklatur mata anggaran yang digunakan masih menggunakan unit kerja lingkup Kemenko Marves. Realisasi anggaran periode Oktober s.d Desember 2024 yakni sebesar Rp2.107.284.697,00 (*Dua Milyar Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) dari pagu anggaran efektif sebesar Rp12.788.959.000,00 (*Dua Belas Milyar Tujuh ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Adapun rincian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Table 1 Realisasi Anggaran Periode Oktober s.d Desember Tahun 2024

	<u>Pagu Anggaran Efektif</u>	<u>Realisasi Oktober 2024</u>	<u>Realisasi Desember 2024</u>	<u>Realisasi Okt s.d Des 2024</u>	<u>Sisa Realisasi</u>	<u>Persen Realisasi 30 Desember 2024</u>
D3	12.788.959.000	10.395.597.529	12.502.881.226	2.107.283.697	286.077.774	97.76 %
A1	1.508.968.000	1.277.717.284	1.505.607.302	227.890.018	3.360.698	99.78 %
A2	1.675.617.000	1.589.949.400	1.656.483.170	66.533.770	19.133.830	98.86 %
A3	1.671.958.000	1.118.138.775	1.659.193.811	541.055.036	12.764.189	99.24 %
A4+HDCM	2.156.445.000	1.767.876.392	2.079.626.134	311.749.742	76.818.866	96.44 %
A5	1.948.770.000	1.664.267.580	1.908.114.687	243.847.107	40.655.313	97.91 %
PPQW	1.520.534.000	1.174.763.597	1.501.402.382	326.638.785	19.131.618	98.74 %
Dukman	2.306.667.000	1.802.884.501	2.192.453.740	389.569.239	114.213.260	95,05%

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran periode Januari s.d Desember 2024 adalah 97.76%. Pada tabel di atas terlihat bahwa unit kerja dengan nilai persentase realisasi anggaran terbesar adalah Asdep 1 (99,78%). Sementara unit kerja dengan nilai persentase realisasi anggaran terendah adalah Asdep 4 (96,44%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3. Potensi dan Permasalahan	2
1.4. Sumber Daya	4
1.5. Sistematika Penyajian	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1 Capaian Kinerja <i>Quick Wins</i> Deputy Infrastruktur Dasar Marves Tahun 2024	7
1.1.1 Bendungan Sidan	7
1.1.2 Bendungan Karian	12
3.2 Realisasi Anggaran	18
BAB IV PENUTUP	20
4.1 Kesimpulan	20
4.2 Rekomendasi	20
LAMPIRAN	21

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Table 1 Realisasi Anggaran Periode Oktober s.d Desember Tahun 2024	iii
Table 2 Realisasi Anggaran Periode Oktober s.d Desember Tahun 2024	18

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	2
Gambar 2 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar ..	4
Gambar 3 Anggaran 2025 Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	5
Gambar 4 Peta Lokasi Infrastruktur Provinsi Bali	8
Gambar 5 Bendungan Sidan (Legenda)	9
Gambar 6 Kunjungan Menko ke Bendungan Sidan	10
Gambar 7 Fasilitas Umum Bendungan	11
Gambar 8 Spillway Bendungan	11
Gambar 9 Lokasi Proyek dan Skema Pemnafaatan Bendungan Karian	13
Gambar 10 Pemanfaatan Air Baku Melalui KSCS	14

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan *quick wins* Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar pada periode Oktober s.d Desember 2024.

Penyusunan laporan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Deputy Infra Dasar sebagai bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

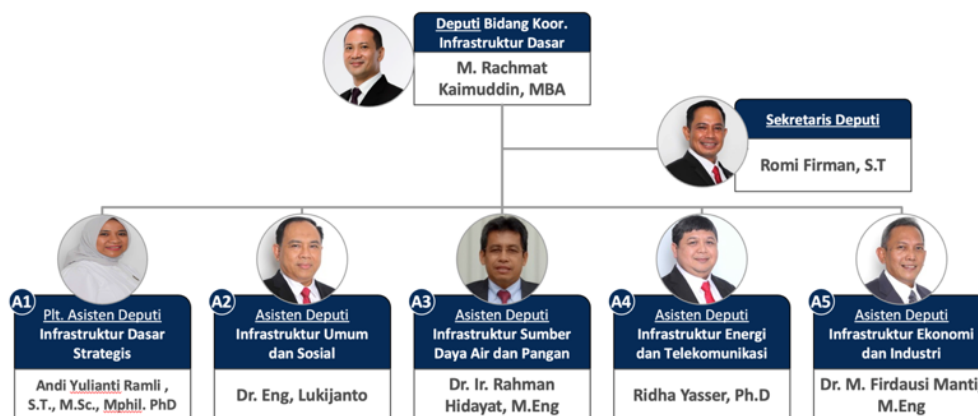
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar menyelenggarakan fungsi:

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
2. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
3. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar;
5. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar.



Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar terdiri atas :

- Sekretaris Deputy;
- Asisten Deputy Infrastruktur Dasar Strategis;
- Asisten Deputy Infrastruktur Umum dan Sosial;
- Asisten Deputy Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pangan;
- Asisten Deputy Infrastruktur Energi dan Telekomunikasi, dan
- Asisten Deputy Infrastruktur Ekonomi dan Industri.

1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputy Infra Dasar dihadapkan dengan berbagai isu strategis sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikut.

1.3.1 Lingkungan Internal

- Sumberdaya Manusia

Perubahan organisasi yang dihadapi oleh Kemenko Infra mempengaruhi ketersediaan dan kondisi sumber daya manusia (SDM). Kemenko Infra yang merupakan bagian dari pemisahan Kemenko Marves mendapatkan sebagian besar

jumlah pegawai ex Kemenko Marves. Sehingga dilakukan pemetaan sumber daya manusia yang termasuk dalam PNS maupun Non PNS.

Meskipun demikian, masih terdapat PNS dengan status dipekerjakan (DPK) dan penugasan yang belum dapat dialihkan secara otomatis, sehingga perlu dilakukan dengan proses mutasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai pedoman, Deputi Infra Dasar telah Menyusun Permenko No.1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

- Dukungan Anggaran

Dukungan anggaran dimaksud sebagian besar digunakan untuk menyiapkan sarana-prasarana, pengembangan kompetensi SDM dan biaya operasional kantor.

- Dukungan Kelembagaan dan Regulasi

Dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang tugas, penguatan organisasi, implementasi proses bisnis dan SOP, serta implementasi budaya kerja.

1.3.2 Lingkungan Eksternal

- Regulasi dan Kebijakan

Sejalan dengan Visi Misi Presiden dalam Asta Cita, Kemenko Infra akan melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian pada sektor, Kementerian dan Lembaga yang berada dibawah koordinasi langsung serta K/L lain yang terkait. Selain itu membentuk struktur organisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah begitu pesat. Berbagai aplikasi berbasis TIK dalam pengelolaan pemerintahan telah tersedia dan/atau dapat dibangun. Hal ini akan memberikan kemudahan, meningkatkan akurasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

Teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi saat ini telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain Pengelolaan keuangan dan BMN, Penganggaran pembangunan, Pengelolaan kinerja, Pengelolaan kepegawaian, Pengelolaan data, dan lain-lain.

- Kondisi Lingkungan

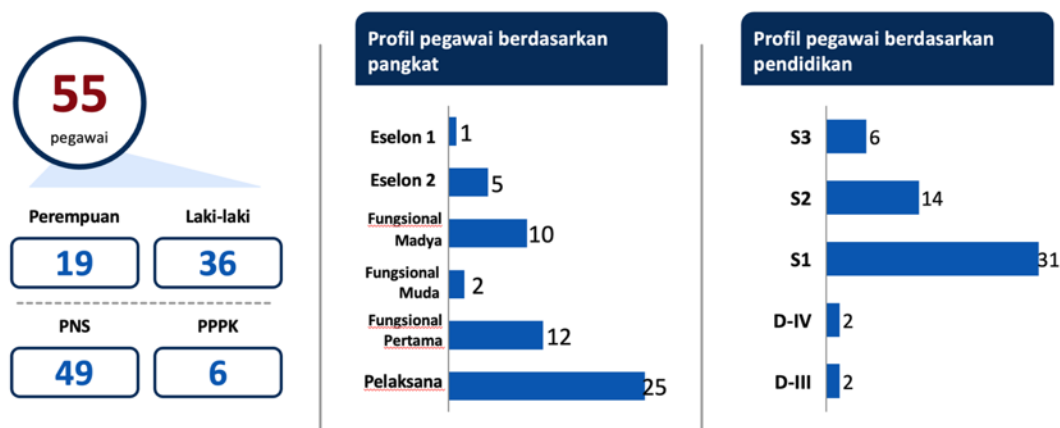
Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pekerjaan di bidang kesekretariatan adalah faktor lingkungan, baik lingkungan hidup, sosial ekonomi maupun lainnya. Dalam bidang sosial politik, sebagai dampak perkembangan teknologi informasi, berkembang pula paham radikalisme yang dapat

membahayakan ketahanan negara. Ini juga menjadi tantangan untuk membentengi ASN dari paham radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan azas negara Pancasila.

1.4. Sumber Daya

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar sampai dengan saat ini memiliki 55 pegawai terdiri dari 19 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 36 perempuan, dengan rincian PNS 49 pegawai dan Calon Tenaga PPPK 6 pegawai. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 2 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

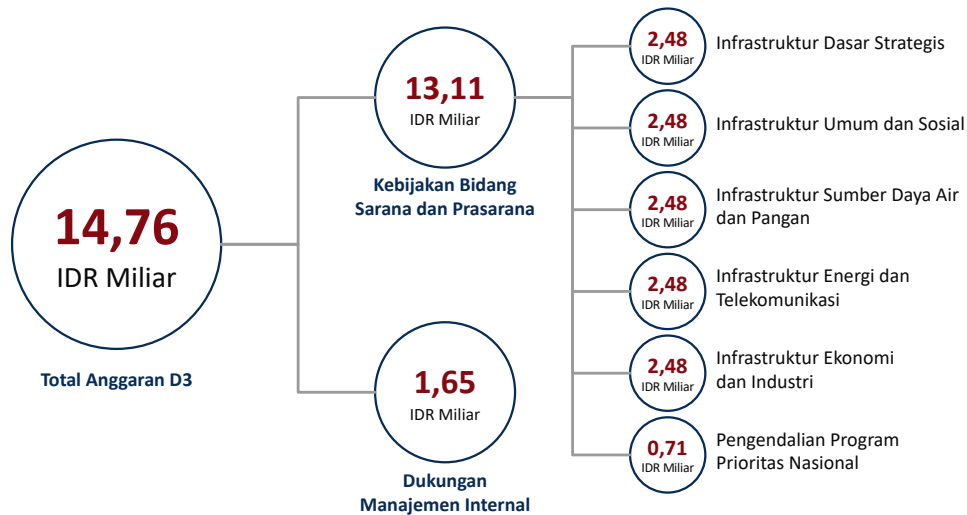
Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah pegawai Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 55 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: 1 Orang Pejabat Eselon 1, 5 Orang Pejabat Eselon 2, 10 Orang Fungsional Madya (9 orang fungsional Analis Kebijakan Madya dan 1 Orang Fungsional Perencana Madya, 2 Orang Fungsional Muda (1 orang fungsional perencana muda dan 1 orang fungsional arsiparis muda), jabatan fungsional pertama berjumlah 12 orang dan 25 orang merupakan pelaksana. Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat 6 orang dengan tingkat pendidikan S3, 14 orang S2, 31 Orang S1, 2 Orang D-IV dan 2 orang D-III.

1.4.2 Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan selama kinerja periode Oktober s.d Desember TA. 2024 masih melanjutkan sisa anggaran Kemenko Marves yang sebelumnya telah disahkan dengan DIPA Induk Nomor: SP DIPA- 120.01.1.350494/2024 tanggal 24 November 2023,

sehingga nomenklatur mata anggaran yang digunakan masih menggunakan unit kerja lingkup Kemenko Marves. Rincian pagu anggaran yang digunakan sebagai berikut:

Anggaran Tahun 2025 D3



3

Gambar 3 Anggaran 2025 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 Deputi Infra Dasar adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan; Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang: tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumberdaya Deputi Infra Dasar serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja; Diuraikan mengenai: rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2024, dan pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; Pada bab ini diuraikan mengenai:

- 1) Realisasi Kinerja Deputi Infra Dasar
- 2) Realisasi Anggaran
- 3) Realisasi Kinerja lainnya
 - Tugas Tambahan program dan kegiatan Deputi Infra Dasar;
 - Capaian lainnya.

Bab IV Penutup; Berisikan penjelasan kesimpulan dan tindaklanjut dimasa depan
Lampiran; berisikan dokumen yang mendukung informasi terkait Bab sebelumnya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Deputi Infra Dasar diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Deputi Infra Dasar sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing.

Namun dikarenakan kinerja periode 2024 Kemenko Infra yang hanya berlangsung selama bulan Oktober s.d Desember 2024, maka kinerja yang diukur hanya berdasarkan program *quick wins* Kemenko Infra. Program *quick wins* Kementerian Koordinator yang dilaksanakan oleh unit Deputi Infra Dasar diantaranya:

1. Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Sidan yang berlokasi di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku, pengendalian banjir, serta mendukung ketahanan energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM).
2. Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Karian yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 315 juta meter kubik dengan luas genangan 1.773 hektare. Tujuan pembangunan bendungan ini adalah untuk mendukung penyediaan air baku, irigasi pertanian, pengendalian banjir, serta potensi energi listrik.

Visi Kemenko Infra adalah pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur Indonesia secara produktif, multiguna, terpadu, berkesinambungan, efisien, dan berkelanjutan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8% dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden tahun 2024-2029. Sehingga visi Deputi Infra Dasar ditetapkan untuk membantu mewujudkan visi Kemenko Infra tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar.

Dengan berlakunya Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menindaklanjuti dengan menyusun laporan kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja berdasarkan *quick wins* dari bulan Oktober s.d Desember 2024. Mengingat kondisi Renstra Kemenko Infra periode 2024-2029 dan Perjanjian Kinerja yang masih dalam tahap penyusunan, maka laporan kinerja ini belum dapat menyajikan penghitungan capaian kinerja.

3.1 Capaian Kinerja *Quick Wins* Deputi Infrastruktur Dasar Marves Tahun 2024

Capaian dari masing-masing *quick wins* Deputi Infra Dasar periode Oktober s.d Desember 2024 yakni Pengawasan Proyek Strategis Nasional sebagai berikut.

1.1.1 Bendungan Sidan

Pengawasan Proyek Strategis Nasional Bendungan Sidan yang berlokasi di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Bendungan Sidan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang berlokasi di Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pembangunan bendungan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air baku, pengendalian banjir, serta mendukung ketahanan energi melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM). Bendungan ini juga memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan air untuk wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), yang diproyeksikan akan menghadapi peningkatan kebutuhan air pada tahun-tahun mendatang.

Bendungan Sidan mulai dibangun pada tahun 2018 dan direncanakan mulai diisi air pada 18 November 2024. Biaya proyek ini mencapai Rp1,5 triliun, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pekerjaan Bendungan per tanggal 11 November 2024 sudah mencapai 95% dengan kedalaman bendungan akan mencapai 828 meter, adapun skema pemanfaatan bendungan ini, dimulai dari menampung air Sungai Ayung.



Gambar 4 Peta Lokasi Infrastruktur Provinsi Bali

Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sebesar 5,8 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 39,4 hektar. Air yang dihasilkan dari bendungan ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku sebesar 1.750 liter per detik, Nantinya akan didistribusikan ke sejumlah kecamatan di empat Kabupaten/Kota.

Dalam laporan kunjungan kerja Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tanggal 11 November 2024 dapat diketahui air yang didistribusikan ini, disesuaikan dengan kebutuhan guna mengantisipasi banjir. Seperti di Kabupaten Gianyar, setiap harinya menerima 300 liter per detik untuk tiga kecamatan yaitu Ubud, Sukawati dan Blahbatuh. Kota Denpasar sebesar 750 liter per detik untuk mengalir wilayah kecamatan Denpasar Timur, Barat, Utara dan Selatan. Kemudian untuk Kabupaten Badung sebesar 500 liter per detik, untuk mengalir Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara, Kuta, dan Kuta Selatan. Terakhir adalah Tabanan, yang akan menerima air baku sebesar 200 liter per detik untuk tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tabanan, Marga dan Kediri. Faktor pendukung dari hasil kunjungan lapangan yaitu:

1. Optimalisasi Distribusi Air: Pemerintah daerah telah meningkatkan efisiensi distribusi air baku sehingga defisit air berkurang dari 797 l/detik menjadi 500 l/detik melalui proyek tambahan jaringan pipa.
2. Penyesuaian Kapasitas PLTM: Kapasitas listrik PLTM meningkat dari 0,65 MW menjadi 1 MW setelah dilakukan optimalisasi turbin dan efisiensi sistem distribusi energi.

3. Manajemen Pengendalian Banjir: Dengan adanya sistem monitoring real-time, efektivitas pengendalian banjir meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Beberapa perusahaan air minum dan industri telah mulai bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan air baku.



Gambar 5 Bendungan Sidan (Legenda)



Gambar 6 Kunjungan Menko ke Bendungan Sidan

Bendungan Sidan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan air domestik dalam mendukung swasembada air dengan menyuplai kurang lebih 34 persen kebutuhan air domestik masyarakat. Selain itu Bendungan Sidan juga untuk mendukung swasembada listrik, karena dari air yang tersedia ini akan dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menghasilkan energi sebesar 0,65 Megawatt, serta dengan memanfaatkan kondisi bendungan yang terbuka, maka juga akan dibuatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung dengan energi yang dihasilkan 8,65 Megawatt.

Bendungan Sidan dapat juga menanggulangi banjir seluas 108 hektar di Kota Denpasar kawasan Denpasar Timur dan Denpasar Utara yang terjadi di Kota Denpasar setiap musim hujan. Dengan adanya bendungan ini, maka debit air sungai yang mengalir saat musim hujan bisa dikontrol.

**BENDUNGAN SIDAN [4-5]
KAB. BADUNG, BANGLI, DAN GIANYAR, BALI**



FASUM BENDUNGAN

7

Gambar 7 Fasilitas Umum Bendungan

**BENDUNGAN SIDAN [5-5]
KAB. BADUNG, BANGLI, DAN GIANYAR, BALI**



SPILLWAY BENDUNGAN

8

Gambar 8 Spillway Bendungan

Ada beberapa faktor penghambat/kendala dalam Implementasi Proyek Strategis Nasional Bendungan Sidan antara lain:

1. Defisit Air Baku Tahun 2025.

Meskipun Bendungan Sidan dapat menyediakan 1.750 l/detik, kebutuhan air baku di wilayah Sarbagita pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 5.097

l/detik, sehingga masih terdapat kekurangan 500 l/detik setelah optimalisasi distribusi.

2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Distribusi air ke berbagai kabupaten/kota memerlukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan PDAM setempat.

Sebagai tindak lanjut, Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar akan melaksanakan langkah-langkah seperti:

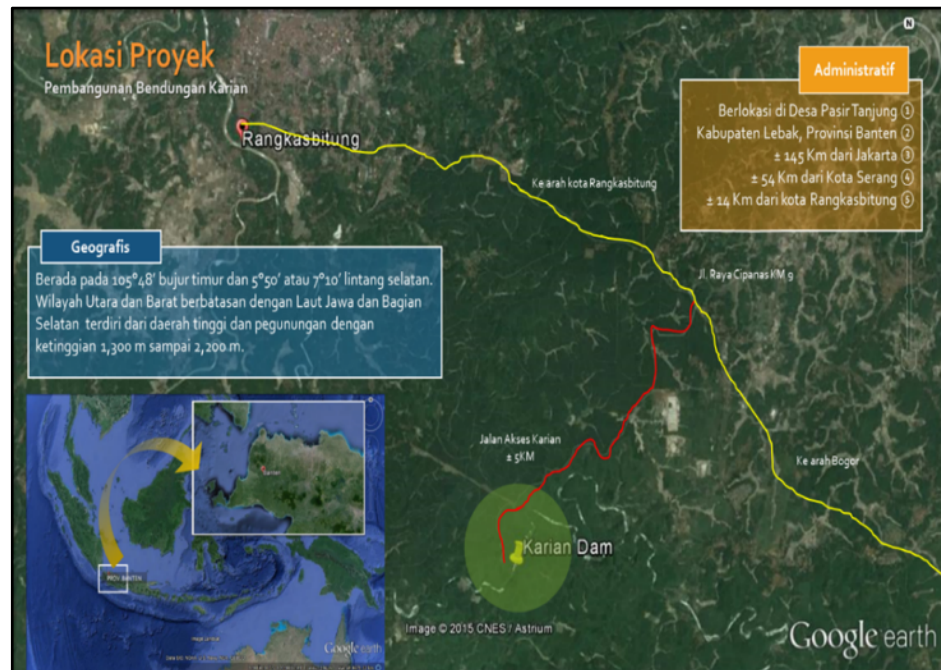
1. pengoptimalan Infrastruktur dimana perlu kajian lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas pemanfaatan bendungan guna mengatasi defisit air baku.
2. Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Mengundang partisipasi swasta dalam pengelolaan dan distribusi air guna memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.
3. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Perlu dilakukan monitoring kinerja bendungan untuk memastikan manfaat jangka panjangnya.

1.1.2 Bendungan Karian

Pengawalan Proyek Strategis Nasional Bendungan Karian yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 315 juta meter kubik dengan luas genangan 1.773 hektare. Tujuan pembangunan bendungan ini adalah untuk mendukung penyediaan air baku, irigasi pertanian, pengendalian banjir, serta potensi energi listrik. Pada tanggal 8 Januari 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Karian yang terletak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pembangunan bendungan ini dimulai pada tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Bendungan ini akan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Barat. Manfaat tersebut antara lain:

1. Penyediaan Air RKI untuk Kab. Lebak, Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan wilayah Prov. DKI Jakarta sebesar 12,4 m³/detik melalui Karian-Serpung Conveyance System (KSCS) (melalui intake site Ciuyah);
2. Penyediaan kebutuhan suplesi ke S. Ciujung sebesar 2,2 m³/detik, dengan alokasi 1,5 m³/detik untuk air baku dan 0,7 m³/detik untuk suplesi irigasi DI. Clujung (melalui intake site of Karian);
3. Pengendalian banjir daerah hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastruktur penting seperti Jalan Tol Jakarta-Merak, Kawasan Industri

- terpadu, dengan kapasitas tampungan banjir sebesar 60,8 juta m³ (spillway dengan pintu radial yang akan dioperasikan dengan pola operasi waduk);
- Menyediakan sarana rekreasi dan tujuan wisata air serta potensi pembangkit energi listrik sebesar 1,8 megawatt melalui pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH)



Gambar 9 Lokasi Proyek dan Skema Pemnafaatan Bendungan Karian

Pemanfaatan Air Baku

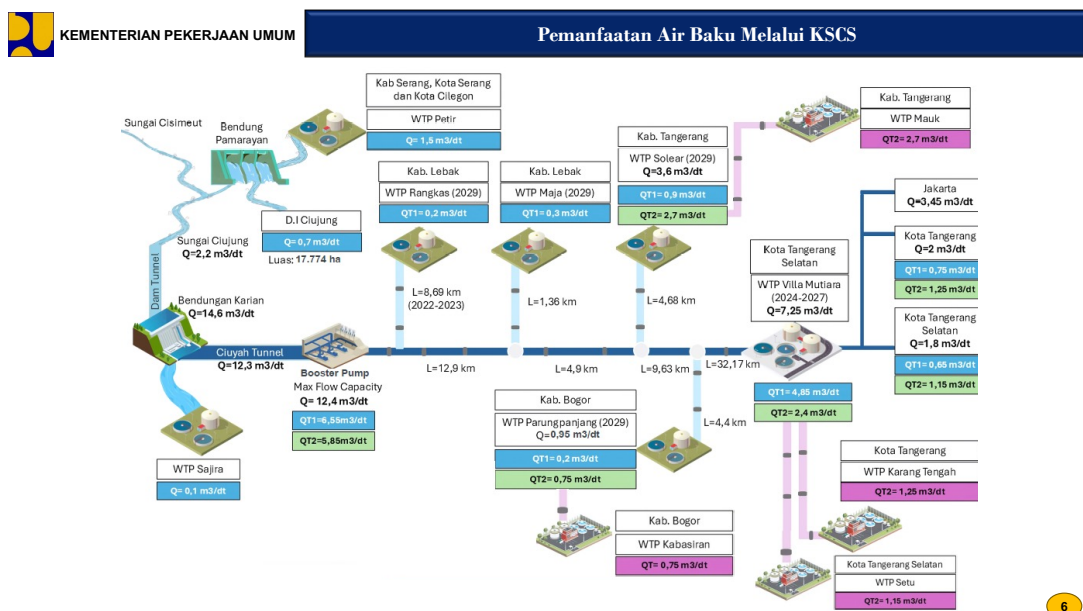
Bendungan Karian menjadi sumber utama dalam penyediaan air baku melalui dua jalur utama:

- Pemanfaatan Air Baku Melalui KSCS

KSCS (Karian-Serpong Conveyance System) merupakan sistem distribusi air baku yang menghubungkan Bendungan Karian dengan wilayah layanan utama. Alokasi air baku dari KSCS mencakup: DKI Jakarta: 4.200 liter/detik, Kota Tangerang Selatan: 1.800 liter/detik, Kota Tangerang: 2.000 liter/detik, Kabupaten Lebak: 600 liter/detik, Kabupaten Tangerang: 3.600 liter/detik, Kabupaten Bogor: 200 liter/detik.

2. Pemanfaatan Air Baku Non-KSCS

Selain melalui KSCS, Bendungan Karian juga akan memasok air baku untuk wilayah sekitar dengan sistem distribusi lain, termasuk skema pelayanan tahap 1 dan tahap 2 yang akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur.



Gambar 10 Pemanfaatan Air Baku Melalui KSCS

Berdasarkan Rapat Koordinasi Optimalisasi Bendungan Multifungsi Karian yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, pada Jumat, 31 Januari 2025, terdapat sejumlah tantangan dan rekomendasi strategis dalam pengelolaan Bendungan Karian.

1. Keterlambatan Penyelesaian KSCS

Karian-Serpong Conveyance System (KSCS) adalah sistem utama yang menyalurkan air baku dari Bendungan Karian ke wilayah DKI Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Namun, proyek ini menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- Proses perizinan trase pipa yang belum selesai, terutama untuk area yang melintasi lahan pemukiman dan infrastruktur lainnya.
- Pembebasan lahan yang belum rampung, dengan beberapa bidang tanah masih berstatus sengketa atau dalam tahap negosiasi harga di pengadilan.
- Keterlambatan loan agreement untuk Paket 4, yang menyebabkan ketidakpastian pendanaan proyek.

Upaya Mitigasi

- Koordinasi intensif antara Kementerian PUPR, Pemda Banten, dan offtakers seperti PAM Jaya dan Perumda Tirta Benteng.
- Peningkatan efisiensi administrasi dalam perizinan lahan dan trase pipa, serta percepatan penyelesaian sengketa tanah.
- Evaluasi opsi pendanaan alternatif, termasuk kemungkinan penggunaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mendukung kelanjutan proyek.

2. Permasalahan Pembiayaan KPBU SPAM Karian-Serpong

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong dikelola melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan PT Karian Water Service (KWS) sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP). Namun, proyek ini mengalami keterlambatan karena:

- Perjanjian Tanggal Efektif Yang Dijadwalkan (TEYD) belum tercapai pada 29 Desember 2024, sehingga proses financial close tertunda.
- KEXIM (Korea Eximbank) telah menyetujui pembiayaan untuk KSCS Paket 4, tetapi terdapat kekhawatiran mengenai komitmen PT KWS dalam menyelesaikan proyek.
- Peningkatan biaya proyek yang mencakup:
 - Kenaikan kontrak EPC dari Rp1,5 triliun menjadi Rp1,9 triliun akibat eskalasi biaya material dan perubahan desain teknis.
 - Perubahan regulasi perpajakan, termasuk kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% dan PPH Badan dari 20% menjadi 22%, yang meningkatkan beban biaya proyek sebesar Rp275 miliar.

Upaya Mitigasi

- Evaluasi ulang model keuangan proyek untuk memastikan keberlanjutan investasi.
- Negosiasi dengan PT KWS untuk mencari solusi atas kenaikan biaya dan kendala teknis lainnya.

- Memastikan kesiapan off-takers seperti PAM Jaya dan Perumda Tirta Benteng dalam penyerapan air baku sesuai jadwal operasional proyek.

3. Hambatan dalam Pembebasan Lahan KSCS

Proses pengadaan lahan untuk KSCS menghadapi berbagai tantangan administratif dan sosial, di antaranya:

- Status kepemilikan lahan yang kompleks, termasuk tanah wakaf, aset desa, dan tanah yang belum bersertifikat.
- Konsinyasi yang terkendala negosiasi harga, terutama di Desa Mekarsari, Desa Pasirkembang, dan Desa Sindang Mulya.
- Sengketa lahan dan penolakan warga, yang masih terjadi di beberapa wilayah seperti Desa Cikasungka dan Desa Babat.
- Keterbatasan SDM Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani proses sertifikasi dan pengukuran administrasi lahan.
- Perizinan teknis untuk infrastruktur lain, seperti rel kereta api, yang memerlukan proses evaluasi hingga 1-2 tahun jika tidak ada percepatan regulasi.

Upaya Mitigasi

- Strategi percepatan pembebasan lahan, dengan target penyelesaian pada November 2025.
- Peningkatan koordinasi dengan Pemda dan BPN, untuk menyelesaikan validasi kepemilikan tanah dan mempercepat proses sertifikasi.
- Pendekatan sosial kepada masyarakat terdampak, termasuk pemberian kompensasi yang adil serta program relokasi berbasis partisipatif.

4. Ketidakpastian Kerja Sama dengan PT Karian Water Service (KWS)

PT KWS sebagai Badan Usaha Pelaksana mengalami beberapa kendala dalam implementasi proyek, seperti:

- Ketidakpatuhan terhadap regulasi Indonesia, termasuk dalam desain teknis yang tidak mempertimbangkan masukan dari pemerintah.
- Keengganan untuk menyelesaikan financial close sesuai jadwal, yang berisiko memperpanjang proyek secara signifikan.
- Permintaan tambahan biaya di luar perjanjian awal, seperti biaya major overhaul di akhir masa kerja sama, yang tidak termasuk dalam model keuangan proyek.

Opsi yang Sedang Dikaji

- Melanjutkan kerja sama dengan PT KWS, dengan negosiasi ulang terkait pembiayaan dan persyaratan kontrak.
- Menghentikan kerja sama dan melakukan tender ulang, meskipun ini akan memakan waktu setidaknya 2 tahun sebelum konstruksi dimulai kembali.
- Akuisisi oleh PAM Jaya, yang telah mengajukan Letter of Intent (LOI) pada Desember 2023, namun ditolak karena nilai penawaran dianggap terlalu rendah.

Upaya Mitigasi

- Diskusi dengan konsorsium Korea Water-AdhiKarya, untuk menentukan kelanjutan atau penghentian kerja sama dengan PT KWS.
- Penyusunan skema mitigasi risiko finansial bagi off-takers, agar mereka tidak terdampak oleh potensi gagal bayar akibat keterlambatan proyek.

5. Alternatif Pendanaan untuk KSCS dan SPAM Karian-Serpong

Karena adanya ketidakpastian dalam loan agreement KSCS Paket 4, pemerintah mempertimbangkan opsi pendanaan lain, termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dimana tersisa anggaran Rp2 triliun dari tahun 2024 yang dapat dialihkan ke tahun 2025 serta dana hibah atau pinjaman dari lembaga internasional, seperti ADB dan World Bank, yang sedang dikaji sebagai opsi cadangan.

Upaya Mitigasi

- Sinkronisasi pembiayaan antara KSCS Paket 1-3 dan Paket 4, untuk memastikan kesinambungan proyek.
- Diskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas, guna memaksimalkan penggunaan SBSN dan sumber dana lainnya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan adalah:

1. Kementerian/Lembaga terkait memastikan kejelasan pendanaan KSCS Paket 4, serta implikasinya terhadap proyek secara keseluruhan (pendanaan Paket 1-3).
2. Kementerian/Lembaga terkait memastikan ketersediaan SBSN sebagai alternatif pendanaan KSCS Paket 4.
3. Kementerian/Lembaga terkait berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk rencana akuisisi saham PT KWS dan kesiapan pengambilalihan proyek SPAM Regional Karian Serpong.

4. Kementerian/Lembaga terkait memastikan arah negosiasi dengan konsorsium Korea Water-AdhiKarya untuk menentukan syarat kelanjutan kerja sama atau penghentiannya.
5. Memperhatikan dan memitigasi risiko terhadap potensi hambatan pembiayaan KEXIM untuk KSCS Paket 1-3, serta mempertajam exercise dalam skema lelang ulang dengan menambahkan faktor potential loss yang akan ditanggung Offtakers.
6. Bersama-sama mendorong KPBU sebagai solusi atas keterbatasan APBN, terutama pada sektor infrastruktur. Untuk mendukung keberlanjutan proyek KPBU di Indonesia diperlukan standard agreement yang dapat dijadikan acuan.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang digunakan oleh Kemenko Infra selama kinerja periode Oktober s.d Desember 2024 yakni sisa anggaran yang dimiliki Kemenko Marves, sehingga nomenklatur mata anggaran yang digunakan masih menggunakan unit kerja lingkup Kemenko Marves. Realisasi anggaran periode Oktober s.d Desember 2024 yakni sebesar Rp22.676.724.033,00 (Dua Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp29.771.939.027,00 (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau 76,17%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Table 2 Realisasi Anggaran Periode Oktober s.d Desember Tahun 2024

Deskripsi	Pagu Awal (Rp)	Pagu Oktober s.d Desember (Rp)	Realisasi		Sisa
			Rp	%	
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	310.723.938.000	39.602.647.659	31.658.677.189	79,94	7.943.970.470
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Bidang Kemaritiman dan Investasi	203.179.955.000	29.771.939.027	22.676.724.033	76,17	7.095.214.994
Biro Umum	158.040.100.000	24.082.869.967	18.184.685.058	75,51	5.898.184.909
Biro Perencanaan	7.844.952.000	2.071.113.751	1.480.713.458	71,49	590.400.293
Biro Hukum	7.973.140.000	1.110.658.375	1.082.776.106	97,49	27.882.269
Biro Komunikasi	24.379.847.000	1.949.959.578	1.380.255.100	70,78	569.704.478
Staf Ahli Menteri	1.443.332.000	236.576.864	236.557.300	99,99	19.564

Deskripsi	Pagu Awal (Rp)	Pagu Oktober s.d Desember (Rp)	Realisasi		Sisa
			Rp	%	
Inspektorat	3.498.584.000	320.760.492	311.737.011	97,19	9.023.481

Keterangan: Aplikasi Smart, Desember 2024 (diolah)

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran periode Oktober s.d Desember 2024 adalah 76,17%. Pada tabel di atas terlihat bahwa unit kerja dengan nilai persentase realisasi anggaran terbesar adalah Staf Ahli Menteri (99,99%). Sementara unit kerja dengan nilai persentase realisasi anggaran terendah adalah Biro Komunikasi (70,78%).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan kinerja ini menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan *quick wins*/program 100 hari Deputy Infra Dasar periode Oktober s.d Desember 2024. Laporan ini menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target dan *output* yang dihasilkan.
2. Secara umum, Deputy Infra Dasar telah melaksanakan program 100 hari dengan baik ditandai dengan *output* berupa pengawalan terhadap beberapa Program Strategis Nasional bidang Infrastruktur khususnya pada Infrastruktur Sumber Daya Air.

4.2 Rekomendasi

Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Deputy Infra Dasar akan berupaya menyelesaikan beberapa target yang belum tercapai dan tetap melaksanakan fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan program 100 hari khususnya K/L dibawah koordinasi Kemenko Infra.
2. Memperkuat koordinasi dengan K/L terkait dalam peningkatan kualitas capaian kinerja.
3. Laporan Kinerja agar dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

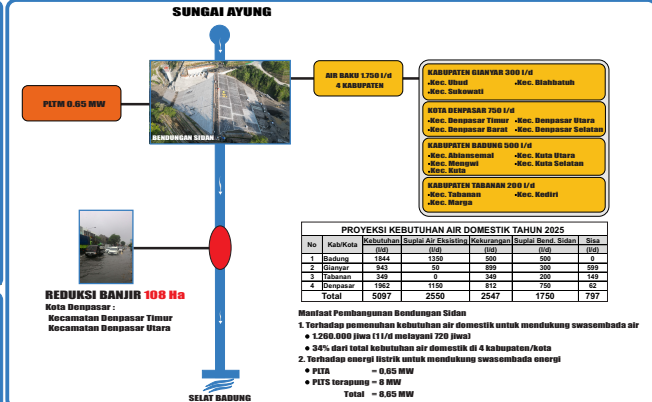
BENDUNGAN SIDAN

KAB. BADUNG, KAB. BANGLI DAN KAB. GIANYAR
PROVINSI BALI

SKEMA PEMANFAATAN BENDUNGAN SIDAN

MASA PELAKSANAAN
2018 - 2024BIAYA
1,5 TKAPASITAS TAMPUNG
5,6 juta m³
LUAS GENANGAN
39 Ha

MANFAAT

AIR BAKU
1.750 liter/detikREDUKSI BANJIR
108 HaPLTM
0,55 MWPLTS TERAPUNG
8 MWKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILANGU CILUJUNG CILURAN

BBWS 13

BENDUNGAN KARIAN

DESA PASIRTANJUNG, KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN

MASA PELAKSANAAN
2016 - 2025BIAYA
Rp. 2,2 TVOLUME TAMPUNGAN
314 Juta m³
LUAS GENANGAN
1.740 Ha

MANFAAT

AIR BAKU
13.900 Liter/detikIRIGASI
21.350 HaREDUKSI BANJIR
1.221 HaPotensi PLTS
318,6 MWPotensi PLTMH
1,8 MW